

# **PAPUA: Wilayah tak Berhukum**

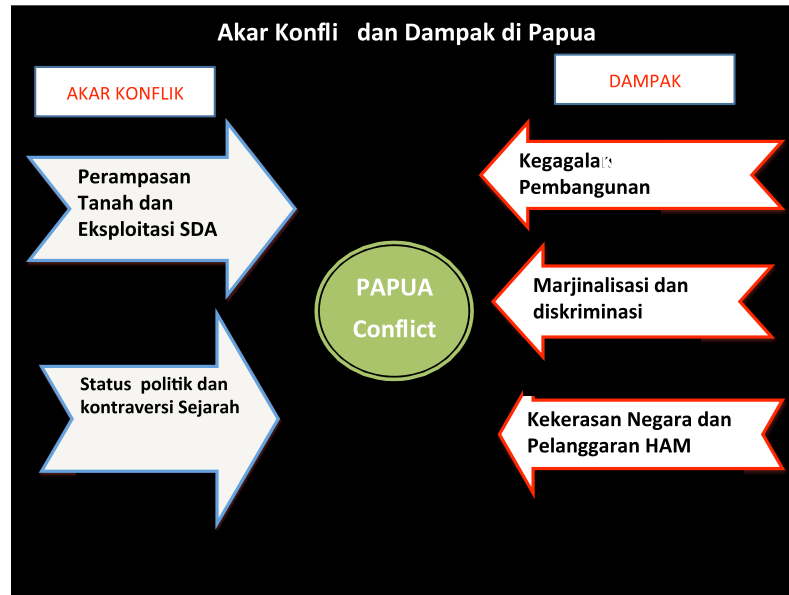
## Catatan Kekerasan di Papua Januari-Juni 2012

### **I. Pengantar**

Sepanjang 2011, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sejumlah praktek kekerasan dan patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat di Papua. Sebanyak 52 peristiwa kekerasan dengan 52 orang meninggal, 59 luka-luka. Termasuk diantara mereka berasal dari TNI dan Polri. Hampir berbanding lurus, angka kekerasan tersebut diiringi dengan angka yang hampir mirip dari ketiadaan penegakan hukum dari kasus-kasus tersebut. Pada November 2011, KontraS, perwakilan mahasiswa Papua, Foker LSM Papua, KAMPAK dan Perwakilan Pekerja PT Freeport pernah diundang ke Komisi I DPR RI dan mengadakan kunjungan ke Mabes Polri yang diterima oleh Waka. Polri, Sdr. Nanan Soekarna, Saud Usman dan sejumlah petinggi Mabes Polri. Dari pertemuan-pertemuan tersebut disampaikan data-data kekerasan yang terjadi di Papua selama beberapa bulan pada 2011. Sayangnya, tindakan tersebut tidak memberikan implikasi pada penurunan kekerasan di Papua. Dalam konteks Pemilu 2012 pun, sejumlah organisasi yang sama yang disebutkan diatas, juga melakukan pertemuan dengan Panwaslu di Jakarta, mendesak agar Panwaslu optimal melakukan pemantauan dan membuat sebuah terobosan atas rangkaian kekerasan dalam sengketa Pemilu 2012 yang berujung kekerasan. Sama, hasilnya nihil sejauh ini. Sementara di Papua, dialog hanya dilakukan lewat institusi perwakilan masyarakat di Papua seperti DPRP.

Memasuki 2012 kekerasan dengan dugaan terjadi pelanggaran HAM yang berat kembali terjadi dengan stabil dari satu kasus ke kasus lainnya. Dalam catatan KontraS, Foker LSM dan NAPAS telah terjadi 34 peristiwa kekerasan an mengakibatkan korban sebanyak 17 meninggal dan 29 orang luka-luka. Jumlah ini termasuk korban dari kalangan TNI dan Polri. Dari sejumlah kasus tersebut patut dicatat berbagai kejanggalan dari sikap, pernyataan dan kebijakan pemerintah, pihak kepolisian dan maupun pihak TNI. Hal inilah yang menjadi titik tekan dari bahan advokasi ini sebagaimana akan digambarkan dibawah.

Kami khawatir bahwa peristiwa demi peristiwa yang terjadi adalah upaya menjauhkan cita akan damai, kesejahteraan dan keadilan bagi orang Papua. Sekedar mengingatkan bahwa apa yang terjadi di Papua bukan sekedar kriminalitas politik namun lebih besar dan kompleks. Septer Manufudu, direktur Foker LSM Papua, mengingatkan bahwa ada 3 persoalan utama di Papua sebagaimana dijelas dibagan dibawah ini;



## II. Temuan Lapangan terhadap Sejumlah Kasus Kekerasan Papua

Berikut disampaikan sejumlah kasus kekerasan yang terjadi yang dilakukakn oleh Polisi, TNI dan pelaku yang tidak teridentifikasi.

### A. Pelanggaran HAM oleh Polisi

#### 1. Penembakan Mako Tabuni, Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Pada tanggal 6 Juni 2012, sekitar pukul 09.00 Wit, Polisi menembak Mako Tabuni di depan Gereja Masehi Advent, Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Kejadian bermula ketika Polisi berusaha menangkap Mako yang sedang berada di sekitar kampus Universitas Cendrawasih Wamena. Berdasarkan informasi lapangan Mako dibuntuti oleh Polisi dengan mobil, salah satu mobil teridentifikasi jenis TAFT warna hitam dengan Nopol DS 447 AJ. Polisi turun dari mobil mencegat Mako dengan senjata dan langsung menembak di kaki. Keterangan Polisi, Mako ditembak dikaki karena berusaha melawan saat ditangkap. Polisi menangkap Mako atas tuduhan terlibat pelaku kekerasan di Papua. Namun fakta lapangan berdasarkan keterangan saksi, Mako tidak melakukan perlawanan. Bahkan Mako berusaha lari menyelamatkan diri setelah Polisi menembak di kaki, tapi kemudian Polisi menembak lagi di kepala hingga tewas.

Setelah peristiwa itu, masyarakat mengamuk membakar ruko, 3 mobil dan 15 motor (*foto terlampir*). Warga yang berada di lokasi sempat menghubungi Polisi untuk menangani tindakan brutal, tapi tidak ada polisi yang datang. Setelah api dipadamkan oleh warga, sekitar 1 jam kemudian baru Polisi, Brimob dan TNI mendatangi ke lokasi kejadian. Sampai saat ini belum ada satu pun pelaku yang menembak Mako di proses secara hukum

#### 2. Penembakan Melianus Kegepe, Selvius Kegepe, Amos Kegepe, Lukas Kegepe, Yulianus Kegepe di Lokasi 45 Degeuwo, Desa Nomouwo, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai Papua.

Personil Brimob BKO Polda Papua, Pos Emas 99, beberapa personil teridentifikasi bernama Briptu Ferianto, Bripda Agus, Bripda Edi menembak 5 warga di lokasi Biliar Daerah 45 Degeuwo, Desa Nomouwo, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua, pada tanggal 15 Mei 2012, sekitar pukul 06.00 Wit. Kejadian bermula ketika Selpius Kegepe, Lukas Kegepe, Amos Kegepe, dan Markus Kegepe mendatangi tempat biliar untuk bermain biliar di lokasi 45. Namun pemilik biliar, Mama Waloni melarang mereka bermain. Keempat orang itu tetap bermain dengan mengambil sendiri bola biliar. Mama Waloni tidak terima kemudian menelpon Pos Brimob yang terletak di lokasi emas 99, sekitar 800 meter dari tempat biliar. Sektika personil Brimob mendatangi lokasi biliar dengan membawa senjata, lengkap helm baja dan baju anti peluru.

Saat Brimob datang, Lukas dan kawan-kawan keluar dari tempat biliar. Saat keluar Lukas mengeluarkan kata-kata “kamu datang cari makan di atas paha saya.” Kata-kata itu memancing emosi personil Brimob sehingga terjadi pemukulan terhadap Lukas dibagian mulut. Melianus Kegepe yang berada di rumahnya membawa balok mengejar personil Brimob yang memukul Lukas. Personil Brimob yang lain langsung menembak Melianus Kegepe dibagian perut hingga tewas. Personil Brimob juga menembak Amos Kegepe di kaki kiri dan betis kanan. Selvius Kegepe ditembak di lengan kanan. Lukas Kegepe ditembak di rusuk, dan Yulianus Kegepe ditembak dibagian punggung. Keempat orang ini mengalami luka kritis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Anggota Brimob pelaku penembakan terhadap 5 warga itu sampai saat ini lepas dari proses hukum.

### **3. Pembubaran Paksa aksi KNPB oleh aparat kepolisian menyebabkan 1 orang tewas ditembak, 2 orang mengalami penyiksaan dan 43 orang ditangkap semena-mena.**

Pada 4 Juni 2012, aparat gabungan Polisi dan TNI membubar paksa aksi KNPB dengan alasan tidak memiliki izin demonstrasi. Hari itu, massa KNPB melakukan aksi menuntut penegakan hukum terhadap serangkain tindakan kekerasan yang dilakukan aparat. Namun aparat menghadang dengan senjata dan menyiksa massa saat sedang menuju titik sentral aksi, di Sentani, Expo dan Kota Madja Jayapura. Dalam peristiwa itu, Yesa Mirin tewas ditembak, Fanuel Taplo, Tanius Kalakmbabin kritis disiksa dan 43 orang ditangkap oleh Polisi.

### **B. Pelanggaran HAM oleh TNI**

Penyerangan warga Wamena, Kabupaten Jayawijaya oleh TNI Batalyon Yonif 756 Wimane Sili/WMS, pada 6 Juni 2012, sekitar pukul 10.00 wib. Dalam penyerangan tersebut, Elinus Yoman tewas ditikam dengan pisau sangkur, dan 13 orang luka-luka ditikam dikepala, punggung, lutut, tangan, paha, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Selain itu, TNI juga membakar 1 mobil, 2 rusak, 8 motor dibakar, 31 rumah warga dan 24 bangunan rumah sehat dibakar, 9 tempat usaha (kios) dibakar, dan 23 rumah sehat dirusak. Penyerangan terhadap warga tersebut sebagai bentuk balas dendam terkait pengeroyokan dua teman mereka, Pratu Ahmad Sahlan (tewas) dan Prada Parloi Pardede (kritis) oleh warga Wamena. Kejadian pengeroyokan terhadap dua anggota TNI tersebut terjadi karena anggota TNI tersebut menabrak seorang anak bernama Kevid Wanimbo di jalan Kampung Honelama.

### **C. Penembakan/Pembunuhan Misterius (Petrus) selama Januari-Juni 2012**

Selain itu, kami juga mencatat pada bulan Januari sampai Juni 2012, insiden Penembakan Misterius (Petrus) meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan kami, tahun 2011 terjadi 13 peristiwa, 1 peristiwa terjadi tahun 2010 dan 12 peristiwa tahun 2009. Sementara pada tahun 2012, terhitung dari Januari sampai 11 Juni 2012, telah terjadi 18 peristiwa penembakan yang mengakibatkan setidaknya 7 warga sipil, satu jurnalis meninggal dan 10 orang

mengalami luka kritis, termasuk warga negara asing Jerman Dietman Pieper (29/05). Namun hampir semua korban ditembak di tempat yang mematikan, seperti di bagian kepala, dada, leher, wajah dan punggung tembus ke dada.

Selain itu, pelaku juga menasar korban secara acak, termasuk TNI dan Polisi. Khusus untuk kasus penembakan aparat keamanan, aksi tersebut dilakukan ketika para aparat keamanan tengah menggelar patroli rutin.

### **III. Respon Pemerintah dan Pihak Keamanan di Papua**

Kami mengapresiasi sejumlah pernyataan keprihatinan dari berbagai kalangan pejabat tinggi terhadap soal Papua, seperti, Presiden RI, Sdr. Soesilo Bambang Yudhoyono, yang mengatakan bahwa “Penyelesaian Papua harus dilakukan dengan komunikasi yang konstruktif dan penegakan hukum harus dikedepankan”. Ketua Komisi 1 DPR RI, juga menyatakan bahwa ada ketidakkoordinasian antara pihak-pihak keamanan di Papua, seperti Polisi, Militer dan Intelijen. Namun demikian kami khawatir bahwa pernyataan-pernyataan tersebut juga mengandung ketidaktepatan pandangan soal Papua, seperti, Presiden SBY yang menyatakan bahwa “kekerasan yang terjadi di Papua masih berskala kecil”. Sementara pihak Komisi 1 DPR yang menyatakan bahwa ada pihak asing yang bermain. Demikian juga dengan MenkoPolhukam yang menyatakan bahwa tindakan Polisi sudah tepat dalam kasus Pembunuhan Mako Tabuni. Pernyataan-pernyataan ini bisa berakibat pada berkepanjangan stigma buruk dan pendekatan yang setengah hati dari pemerintah.

### **IV. Rekomendasi**

Mempertimbangkan sejumlah catatan di atas dan kondisi Papua yang lebih besar, kami merekomendasikan agar;

#### **I. Presiden Republik Indonesia**

1. Mengevaluasi sistem dan kinerja aparat keamanan di Papua
2. Segera membuat Peraturan Presiden untuk menunjukan tim dialog atau komunikasi dengan masyarakat Papua.
3. Memerintahkan Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas sejumlah kasus-kasus kekerasan di Papua, pada 2011-2012. Termasuk meminta LPSK untuk segera turun ke lokasi atau korban-korban kekerasan di Papua dengan tujuan memberikan perlindungan.
4. Memastikan Kapolri dan Panglima TNI tidak akan mengirim pasukan Papua

#### **II. Dewan Perwakilan Rakyat**

1. Segera membuat tim kerja untuk evaluasi kinerja pemerintah di Papua, dengan titik tekan pada soal keamanan dan penegakan hukum di Papua.

#### **III. Kepala POLRI**

1. Segera melakukan penyelidikan atas kasus-kasus penembakan misterius secara profesional, seperti memeriksa peluru-peluru yang dipergunakan dalam penembakan misterius
2. Memastikan aparat polisi dilapangan (di Papua) untuk tidak melakukan tindakan dan pendekatan kekerasan.
3. Memastikan anggota-anggotanya untuk bisa diakses dan diperiksa oleh Komnas HAM, Ombudsmen dan Komnas Perempuan.

#### **IV. Panglima TNI**

1. Memastikan aparat TNI dilapangan (di Papua) untuk tidak melakukan tindakan dan pendekatan kekerasan.
2. Memastikan anggota-anggotanya untuk bisa diakses dan diperiksa oleh Komnas HAM, Ombudsmen dan Komnas Perempuan.

#### **V. Komnas HAM, Ombudsman, LPSK, Komnas Perempuan dan KPAI**

1. Secara bersama-sama segera membuat tim pemantauan kekerasan di Papua, setidaknya selama 6 bulan kedepan
2. Secara bersama-sama membuat tim investigasi atas berbagai kekerasan yang terjadi terutama pada 2011-2012.

Demikian bahan ini kami sampaikan. Semoga menjadi perhatian semua pihak.

#### **Jakarta-Papua, 27 Juni 2012.**

KontraS, Fokker LSM Papua, NAPAS, KAMPAK, JAP-HAM Wamena, Tokoh Agama Papua, AJAR, JATAM, Imparsial, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua di Jakarta.